



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Dipanggil Pansus, Inspektorat Mangkir

BENGKULU - Jadwal agenda pertemuan tim Panitia Khusus (Pansus) mutasi DPRD Kota Bengkulu, dengan Badan Inspektorat Kota, kemarin (8/7) pagi terpaksa batal dilaksanakan. Lantaran

pihak Badan Inspektorat tidak hadir alias mangkir dalam pertemuan yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB.

"Ya sesuai jadwal harusnya tadi (kemarin, red) meru-

pakan pertemuan dengan Inspektorat Kota selaku bagian dari Pemerintah Kota.

Namun sayangnya mereka tidak bisa memenuhi undangan kita tanpa keterangan jelas. Padahal persoalan mu-

tasi yang terjadi selama ini pihak Inspektorat juga mengetahui keseluruhannya," ketua Ketua Pansus Mutasi DPRD Kota, Hamsi, A.Md.

Selain itu ditegaskan Hamsi, guna mencari titik temu terkait

menuntaskan polemik mutasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota beberapa waktu lalu, tim Pansus mutasi DPRD Kota akan melibatkan pakar hukum dan pemerintahan.

☞ Baca **DIPANGGIL..** Hal 19

Sambungan dari hal 10

"Beberapa pihak akan kita libatkan nantinya. Termasuk kita akan minta pendapat dari pakar hukum dan pemerintahan, berkaitan dengan aturan mengenai mutasi tersebut. Karena bagi kami pendapat pakar hukum dan pemerintahan nantinya sangat penting," kata Hamsi.

Tidak hanya melibatkan pakar hukum dan pemerintahan saja, menurut Hamsi, pihaknya juga akan melibatkan Ombudsman berkaitan soal adanya laporan

beberapa pihak mengenai mutasi yang merugikan ASN ataupun pejabat. "Nanti kita juga akan undang pihak Ombudsman, karena dalam menggali informasi itu semua pihak yang berkompeten juga harus kita libatkan, agar ada titik temu penyelesaian persoalan tersebut," ungkapnya.

Selain itu perlu diketahui, lanjut Hamsi, bahwa hasil rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh tim Pansus mutasi tersebut juga akan disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maupun

sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan. Selain itu ia mengatakan, dewan juga mempunyai hak interpelasi berkaitan dengan kebijakan pemerintah tersebut.

"Jadi terkait apa hasilnya nanti kita akan laporkan juga ke KASN yang akan melakukan evaluasi. Misalnya bahwa dari kajian kita terbukti mutasi yang dilakukan itu melanggar, maka bisa jadi mutasi sebelumnya itu dianulir. Karena banyak contoh di daerah lain, mutasi yang dianulir tersebut karena terbukti ada pelanggaran," jelasnya. (new)